

PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGELOLA DAN PENATAAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN DESA DI DESA PENUKTUKAN

Gede Iwan Setiabudi¹, Kadek Lila Antara¹, Hamdanul Fain¹, I Nengah Suparta², I Gusti Lanang Agung Parwata³, I Ketut Suidiana⁴, Anak Agung Ayu Agung Widhyani¹, Joy Steven Emmanuel¹, Hani Fattus Sabrina Anam¹, Ni Kadek Martha Ayu Saraswati¹, Immanuel Kristo Limbong¹

¹Jurusan Biologi dan Kelautan Perikanan FMIPA UNDIKSHA, ²Jurusan Matematika FMIPA UNDIKSHA, ³Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FOK UNDIKSHA, ⁴Jurusan Kimia FMIPA UNDIKSHA
Email: iwansetiabudi@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Village Forest management in Penuktukan Village, Bali, faces challenges such as lack of community participation, limited water resources, and lack of knowledge on sustainable forest management. This community service program aims to improve the capacity of the Penuktukan Village Forest Management Institution (LPHD) and other stakeholders in managing the Village Forest through training and Focus Group Discussions (FGD). The training covers topics such as forest management policies, forest management techniques, and water chain development. The FGD involves various stakeholders to discuss sustainable forest management strategies. The results of this program are expected to increase knowledge, skills, and community participation in sustainable Village Forest management..

Keywords: Village Forest, Management, Penuktukan, LPHD, FGD.

ABSTRAK

Pengelolaan Hutan Desa di Desa Penuktukan, Bali, menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan air, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPHD Desa Penuktukan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola Hutan Desa melalui pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD). Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti kebijakan pengelolaan hutan, teknik pengelolaan hutan, dan pembangunan rantai air. FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hasil dari program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hutan Desa, Pengelolaan, Penuktukan, LPHD, FGD.

PENDAHULUAN

Penuktukan adalah salahsatu desa di ada di Kecamatan Tejakula. Desa tersebut termasuk desa pesisir, karena berbatasan langsung dengan laut Bali di bagian utara. Berjarak 38 km dari pusat kota Singaraja dan 5 km dari pusat kecamatan Tejakula. Status

kewilayahnya adalah desa. Luas desa bagian daratannya mencapai ±6,25 km² (Kecamatan Tejakula dalam Angka tahun 2023). Berbatasan dengan desa Les di Barat, Desa Sambirenteng di Selatan, laut Bali di Utara dan desa Siakin (Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli) di Selatan (Gambar 1). Jumlah penduduk 5680 orang dengan 1700 kepala keluarga.

Hutan desa adalah salah satu skema perhutanan sosial yang memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Hutan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Namun, pengelolaan hutan desa seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan konflik kepentingan antar para pihak.

Desa Penuktukan di Bali memiliki hutan desa seluas 225 ha yang telah mendapatkan hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sejak tahun 2017. Hutan desa ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat, misalnya melalui pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Namun, pengelolaan hutan desa di Desa Penuktukan menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan desa.
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Keterbatasan air di kawasan hutan desa, yang menjadi kendala dalam pengembangan potensi hutan.

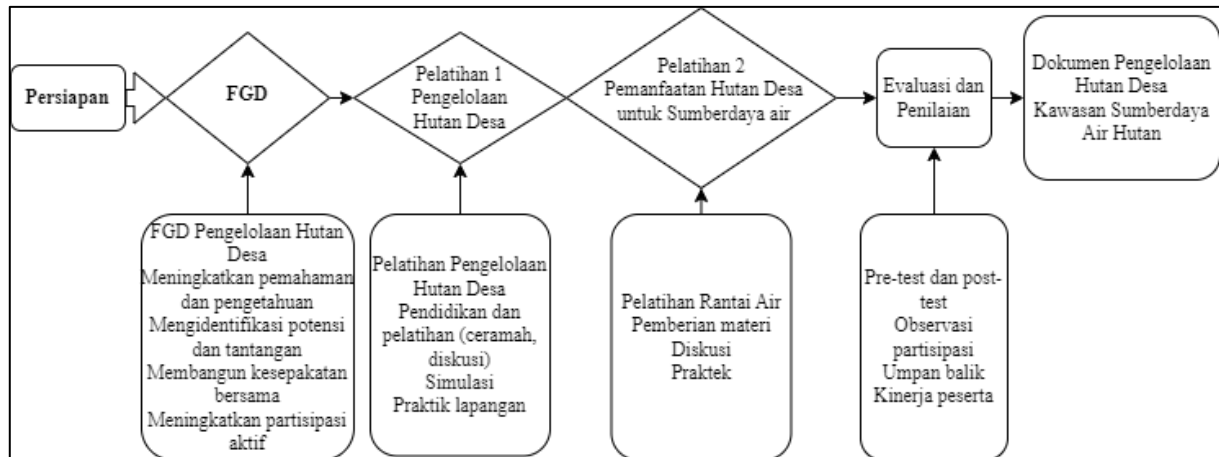
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan desa. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan dapat mencakup topik-topik seperti kebijakan pengelolaan hutan,

teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pembangunan rantai air. FGD dapat digunakan untuk membahas strategi pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan dan membangun kesepakatan bersama antar para pihak.

Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, diharapkan pengelolaan hutan desa di Desa Penuktukan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi dan ekologi bagi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan pelatihan. FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa untuk membahas strategi pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi dan penataan kawasan sumberdaya air di hutan desa. Pihak yang utama adalah LPHD Desa Penuktukan dan Pemerintahan Desa Penuktukan, serta pemangku kepentingan terkait pengelolaan hutan di desa. Topik-topik yang dibahas dalam FGD antara lain kebijakan dan peraturan tentang hutan desa, pentingnya hutan desa, potensi dan tantangan dalam pengelolaan hutan desa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pelatihan yang dilakukan mencakup dua topik utama, yaitu (1) identifikasi wilayah dan sumber daya hutan, dan (2) identifikasi sumber daya hutan untuk penangkapan dan rantai air. Metode pelatihan yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, praktik lapangan, dan studi kasus.



Gambar 1. Judul Gambar metode pengabdian tentang pengelolaan hutan desa dan sumberdaya airnya di Desa Penuktukan

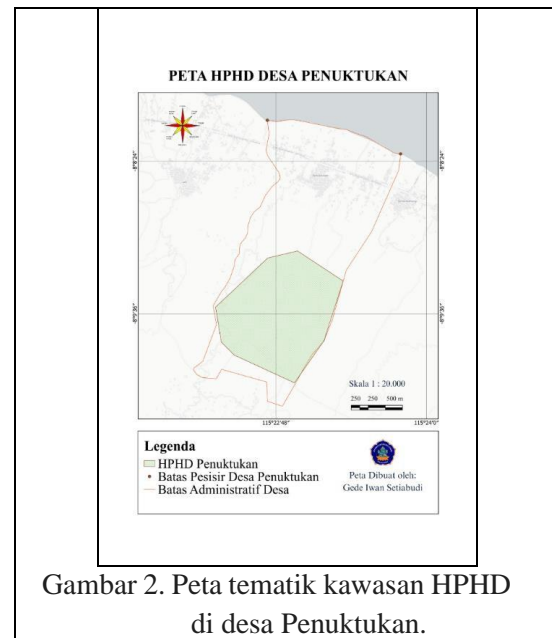
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas LPHD Penuktukan dalam pengelolaan hutan desa. Hal ini terlihat dari peningkatan pemahaman LPHD tentang pengelolaan hutan desa, kemampuan LPHD dalam mengelola kawasan hutan sebagai penunjang sumber daya air, dan kemampuan LPHD dalam melakukan metode pengelolaan hutan desa dan sumber daya air hutan dengan baik.

Secara rinci, hasil kegiatan pengabdian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan pemahaman LPHD tentang pengelolaan hutan desa. Melalui FGD dan pelatihan, LPHD Penuktukan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan peraturan, potensi dan tantangan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan desa.
2. Peningkatan kemampuan LPHD dalam mengelola kawasan hutan sebagai penunjang sumber daya air. LPHD Penuktukan dilatih untuk mengidentifikasi sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk penangkapan rantai air. LPHD juga dilatih untuk membangun dan mengelola rantai air di hutan desa.
3. Peningkatan kemampuan LPHD dalam melakukan metode pengelolaan hutan desa dan sumber daya air hutan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai bagi LPHD dalam mengelola hutan desa.



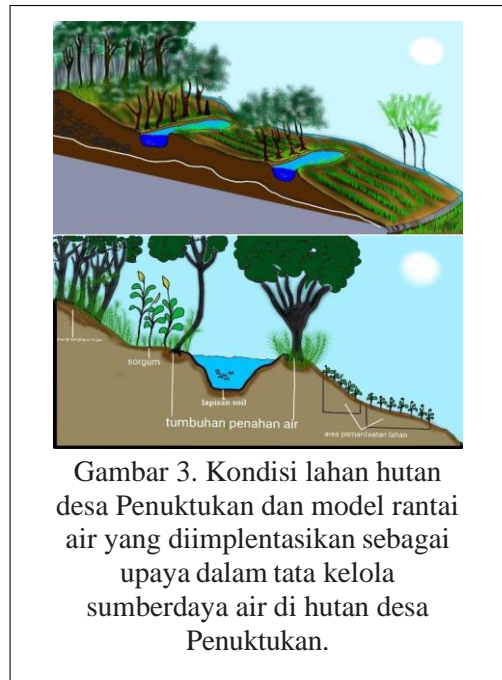
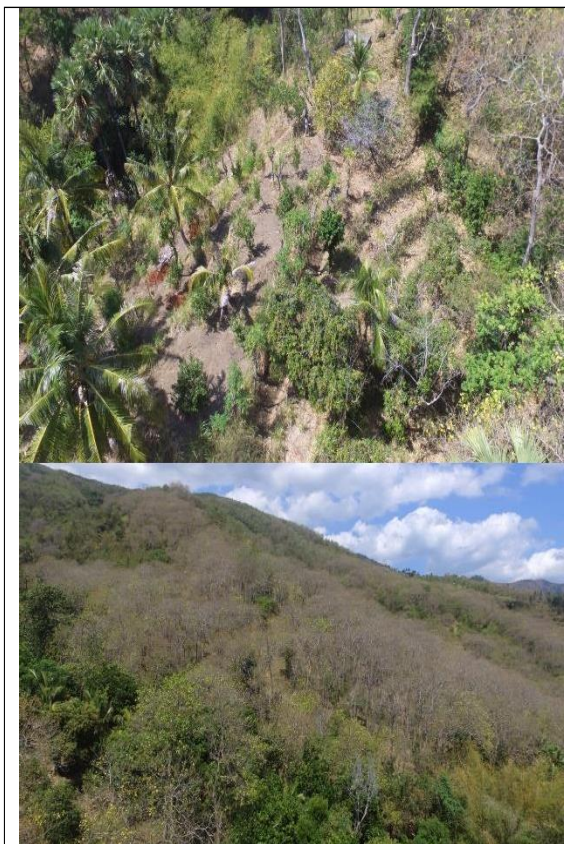
Gambar 2. Peta tematik kawasan HPKD di desa Penuktukan.

Implementasi pengelolaan sumberdaya air di hutan dengan menggunakan rantai air sudah dilakukan dengan menentukan titik koordinat

potensial untuk penangkapan dan cadangan air di hutan desa.



Gambar 2. Kegiatan FGD bersama LPHD Desa Penuktukan, Kepala Desa



Gambar 3. Kondisi lahan hutan desa Penuktukan dan model rantai air yang diimplentasikan sebagai upaya dalam tata kelola sumberdaya air di hutan desa Penuktukan.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPHD Penuktukan dalam pengelolaan hutan desa. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu FGD dan pelatihan. FGD melibatkan berbagai stakeholder, seperti LPHD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan instansi terkait. FGD membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan hutan desa, seperti kebijakan dan peraturan, potensi dan tantangan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pelatihan yang dilakukan mencakup dua topik utama, yaitu identifikasi wilayah dan sumber daya hutan, dan identifikasi sumber daya hutan untuk penangkapan dan rantai air.

Metode pelatihan yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, praktik lapangan, dan studi kasus. Metode ini dipilih agar peserta pelatihan dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, pendekatan andragogis juga digunakan dalam pelatihan ini. Pendekatan andragogis menekankan pada keterlibatan aktif peserta, pembelajaran yang berpusat pada peserta, dan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa LPHD Penuktukan telah

berhasil meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan hutan desa. Hal ini terlihat dari pemahaman yang baik dari LPHD tentang pengelolaan hutan desa, kemampuan LPHD dalam mengelola kawasan hutan sebagai penunjang sumber daya air, dan kemampuan LPHD dalam melakukan metode pengelolaan hutan desa dan sumber daya air hutan dengan baik.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Kepala Desa Penuktukan, KPH Bali Timur, dan mahasiswa. Dukungan ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan desa. Sinergi ini penting untuk keberlanjutan pengelolaan hutan desa di masa yang akan datang. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan beberapa luaran, antara lain:

1. Modul pelatihan pengelolaan hutan dan pembuatan rantai air.
2. Draft dokumen rencana pengelolaan hutan desa oleh LPHD Penuktukan.
3. Titik koordinat rantai air.
4. Dokumen metode pembuatan rantai air.

Pemerintahan Desa Penuktukan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan hutan desa. Hal ini terlihat dari upaya mereka untuk menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian, seperti penanaman pohon dan patroli untuk mencegah perambahan hutan. Selain itu, mereka juga mendorong pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti pengembangan ekowisata, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi kayu. Pemerintah desa juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti LSM dan perguruan tinggi, untuk mendapatkan dukungan

dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintahan Desa Penuktukan berkomitmen untuk menjaga hutan desa sebagai aset penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

KPH Bali Timur menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan hutan desa Penuktukan melalui berbagai upaya. Pertama, mereka aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH), dalam hal pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Kedua, KPH Bali Timur juga memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang teknik budidaya tanaman kehutanan, seperti pengembangan tanaman obat dan tanaman kayu pertukangan, untuk meningkatkan nilai ekonomi hutan. Ketiga, mereka berperan aktif dalam upaya konservasi hutan, seperti program penanaman pohon dan pencegahan kebakaran hutan, serta mendorong penerapan praktik agroforestri untuk menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, KPH Bali Timur memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi terkait pengelolaan hutan lestari. Dengan berbagai langkah tersebut, KPH Bali Timur berkomitmen untuk mendukung masyarakat Desa Penuktukan dalam mengelola hutan desa secara berkelanjutan dan menyejahterakan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas LPHD Penuktukan dalam pengelolaan hutan desa. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Penuktukan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

Meskipun kegiatan pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Peningkatan tersebut antara lain peningkatan kemampuan LPHD dalam menetapkan zonasi hutan, peningkatan teknik pemanfaatan hutan secara lestari, dan revisi dokumen pengelolaan hutan desa. Peningkatan ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan hutan desa di Desa Penuktukan.

SIMPULAN

LPHD Penuktukan, baik pengurus maupun anggotanya, telah berhasil meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan hutan desa. Mereka kini memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan hutan desa dan mampu mengelola kawasan hutan sebagai penunjang sumber daya air. Lebih lanjut, LPHD Penuktukan juga mampu menerapkan metode pengelolaan hutan desa dan sumber daya air hutan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Kebijakan dan Peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/156227/Permen%20LHK%20Nomor%2083%20Tahun%202016.pdf>)

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hak Atas Tanah dan Penataan Ruang Kawasan Hutan
(<https://setkab.go.id/inpres-no-82018-presiden-instruksikan-penundaan-pelepasan-kawasan-hutan-untuk-perkebunan-sawit/>)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Desa
(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150674/permendes-pdt-no-23-tahun->)

Jurnal Ilmiah

Amalia, R. F., & Erni, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Manajemen Hutan Tropis*, 22(2), 222-233.
(<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht>)

Basuki, I., & Santoso, D. (2020). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bloro. *Jurnal Kehutanan*, 15(1), 71-84.
(<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jik>)

Darmayanti, A. S., & Mardiah, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Kebijakan dan Kajian Pembangunan*, 10(1), 1-18.
(<https://fia.ub.ac.id/profil/unit-pendukung/laboratorium-kebijakan-publik-dan-perencanaan-pembangunan-lkp3/>)

Buku dan Laporan

CIFOR. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*.
(https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BFirdaus1801.pdf)

Kemenkominfo RI. (2021). *Panduan Singkat Jurnalistik Perhutanan Sosial*.
(<https://advokasi.aji.or.id/safety?artikel=43&kategori=4>)

World Agroforestry Centre (ICRAF). (2016). *Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*.